STRATEGI DAN LANGKAH PENGAWALAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM

Inspektur Utama,
Dra. Mayagustina Andarini., Apt., M.Sc.

Tangerang, 20 Agustus 2021

OUT LINE

1. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM
2. Srategi yang dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) Badan POM
3. Srategi dan Kiat untuk Unit Kerja
4. *Best Practice* dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM

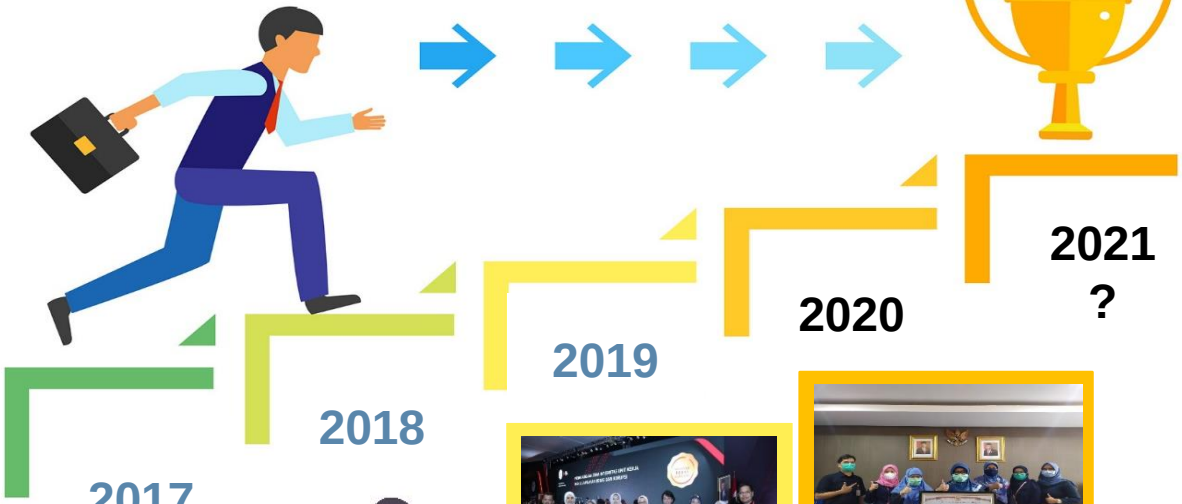

2017

4 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK

2018

belum berhasil mendapat predikat WBK

2019

7 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK

2020

10 Unit Kerja Badan POM mendapatkan predikat WBK dan 1 unit kerja predikat WBBM

2021 ?

TOTAL 20 UNIT KERJA PREDIKAT WBK dan 1 UNIT KERJA BERPREDIKAT WBBM

Kebijakan Pembangunan ZI

1

Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM

menjadi

Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM

2

Surat Edaran Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.02.21.01 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM tahun 2021

3

Keputusan Kepala Badan POM tentang Tim Penilai Internal Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM tahun 2021

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01.1.2.02.21.101 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan bobot/nilai pencapaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan bobot/nilai dalam lembar kerja evaluasi yang disusun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.17.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala BB /BPOM di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01.1.2.02.21.01 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

A. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh komponen organisasi diperlukan percepatan melakukan pembangunan Zona Integritas

Kebijakan Mutu
Mendukung Pembangunan ZI WBK/WBBM

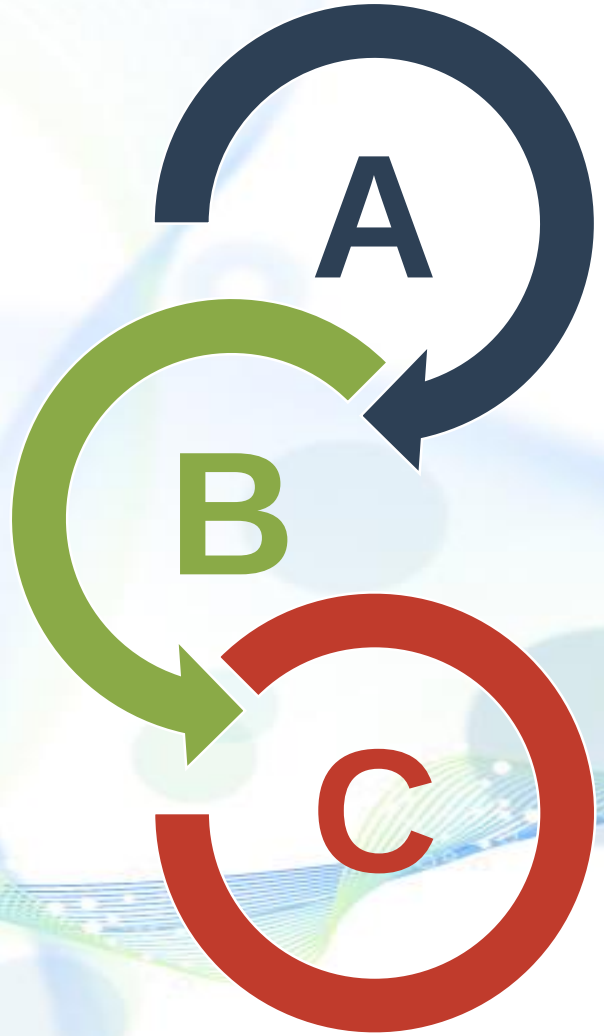

Keputusan Kepala BPOM
HK.02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) BPOM

BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan **pelayanan** kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip **pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.**

Tujuan:

Mendukung capaian sasaran reformasi birokrasi:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

PENETAPAN *ROADMAP* PMPZI

2020

Surat Keputusan Inspektur Utama BPOM No.HK.02.02.7.72.03.20.357 tentang *Road Map* Pelaksanaan PMPZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2020

2021

Surat Keputusan Inspektur Utama BPOM No.HK.02.02.7.72.03.21.04 tentang *Road Map* Pelaksanaan PMPZI menuju WBK/WBBM di Lingkungann Badan POM Tahun 2021

1. Revisi Pedoman
2. Penetapan SE Penyusunan tools survei IPP-IPAK
3. Bimtek dan Intervensi dalam rangka pembangunan ZI
4. Pelaksanaan sosialisasi kepada TPU unit eselon I

1. PMPZI pada masing-masing unit (self assesment)
2. Pelaksanaan Survei IPP IPAK melalui Aplikasi Simolekdesi
3. Desk TPI (internal) Tahap 1
4. Monev Unit Kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM
5. Desk evaluasi dalam rangka panel oleh TPI (internal dan eksternal)
6. Pengajuan ke KemenPANRB

1. Pendampingan dalam rangka persiapan evaluasi oleh KemenPANRB
2. Penyiapan customer list survei eksternal IPP+IPAK
3. Survei Eksternal IPP+IPAK
4. Pendampingan pada saat Desk evaluasi
5. Pendampingan pada saat Evaluasi Lapangan

Penetapan sebagai *Quick Wins* RB Badan POM

Peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan teknis, intervensi dan evaluasi Unit Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

SK Quick Wins No.HK.02.02.1.2.06.20.207 Tahun 2020

Latar Belakang

Wujud Komitmen Badan POM dalam melaksanakan Reformasi Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM

Untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju birokrasi berkelas dunia, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Penetapan Indeks RB Unit Kerja

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 **pada seluruh Unit Kerja.** Indeks RB merupakan nilai WBK berdasarkan penilaian TPI

- **Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- **Surat Inspektur Utama No B-PI.06.01.7.72.01.20.133 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian target, Definisi Operasional, dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP Badan POM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024**

No	IKU	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM (nilai rata-rata nasional tahun 2019 adalah 75,81					
a.	≤75,81	85	89	93	94	95
b.	>75,81 – 81,81	88	90	93	94	95
c.	>81,81 – 86,81	90	91	93	94	95
d.	>86,81	91	92	93	94	95

TARGET PEMBANGUNAN ZI

- Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu indikator pada area penguatan pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Target yang ingin dicapai antara lain :

a. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara
b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
c. meningkatkan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN

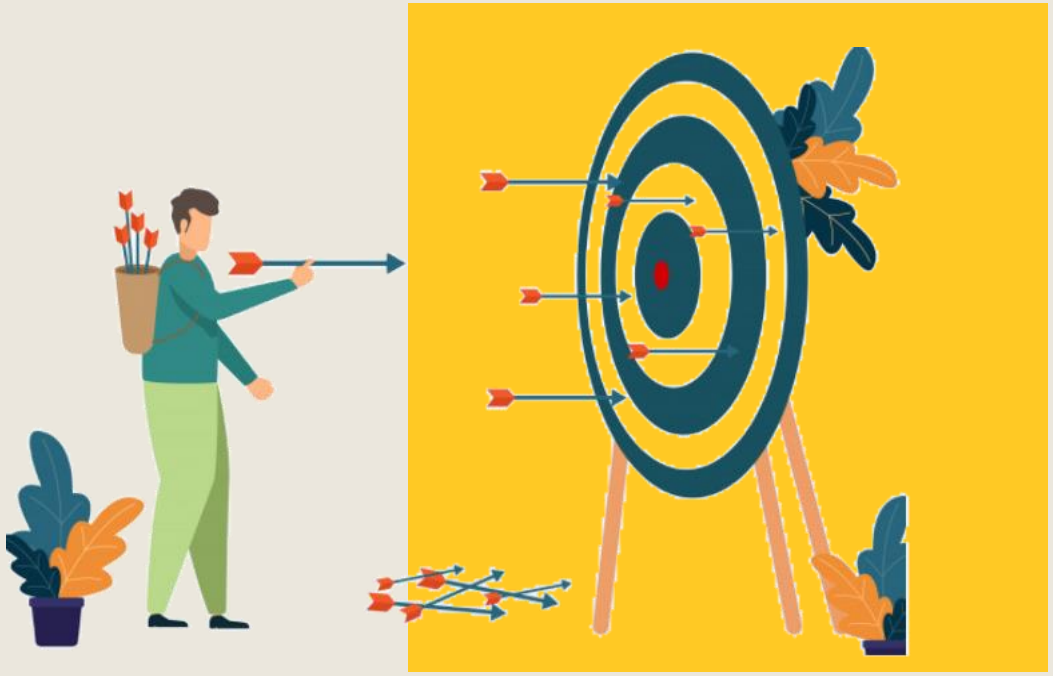

- Target WBK/WBBM Tahun 2021

Terdapat 25 Unit Kerja berpredikat WBK dan 7 Unit Kerja berpredikat WBBM di Lingkungan Badan POM

- Target WBK/WBBM sampai dengan Tahun 2024

Terdapat 40 Unit Kerja berpredikat WBK dan 13 Unit Kerja berpredikat WBBM di Lingkungan Badan POM

Strategi yang dilakukan TPI

Roadmap PMPZI

Indeks RB Unit Kerja

Kebijakan Pembangunan ZI

Quick Wins RB Badan POM

Fasilitasi *Self Assesment* LKE PMPZI dan Survei IPP-IPAK Unit Kerja

Pendampingan Unit Kerja

Unit Kerja wajib melakukan *self assessment* dan melaksanakan survei mandiri IPP-IPAK

Batas waktu pengajuan ke TPI 12 Maret 2021 pukul 24.00 WIB

Desk TPI Tahap I (akhir Maret sd Awal April)

Desk TPI Tahap II/Panel (pertengahan Mei)

Submit Pengajuan oleh TPI melalui pmpzi online (akhir Mei)

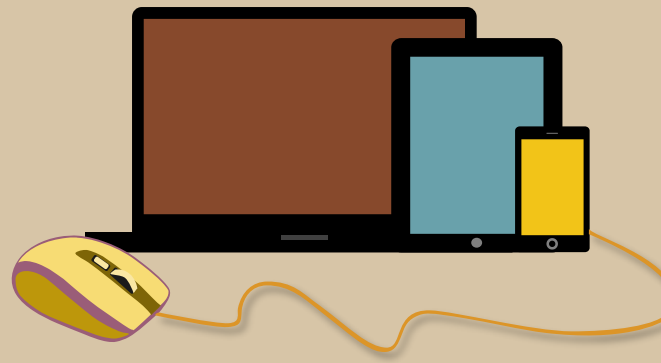

PRIORITAS

- Unit kerja yang pernah diajukan kepada Kementerian PANRB namun belum berhasil memperoleh predikat WBK maupun WBBM
- Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik
- Unit kerja yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan ZI dan dibuktikan dengan hasil penilaian TPI “Memenuhi Syarat”
- Unit kerja yang diajukan sebagai perwakilan dari masing-masing Unit Kerja tingkat Eselon I

Khusus Pengajuan WBBM harus :

- Sekurang-kurangnya telah dua tahun menerima predikat WBK dari Kementerian PANRB
- Berdasarkan monev yang dilaksanakan oleh TPI Unit dinilai dapat mempertahankan predikat WBK
- Memiliki inovasi unggulan yang telah direplikasi oleh unit kerja maupun instansi lain

Self Assesment LKE PMPZI dan Pemenuhan Data Dukung

Inspektorat selaku TPI memfasilitasi melalui Link:

https://sites.google.com/view/pmpzibadanpom

Dengan cara :

- menu "Pengisian LKE ZI
- pilih "Balai Besar/Balai POM" atau "Unit Kerja Pusat"
- pilih "LKE" untuk mengisi LKE
- pilih "Data Dukung" untuk mengunggah data dukung

Fasilitasi *Self Assesment* LKE PMPZI dan Survei IPP IPAK Unit Kerja

Elektronisasi pelaksanaan Survei IPP-IPAK

Survei dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Kerja dan BB/BPOM dengan jumlah **responden 50 (lima puluh) orang**. Survei terintegrasi dengan SKM dan dilaksanakan melalui aplikasi SAPA APIP

Metode Pelaksanaan Survei

1

Via Subsite
Unit Pelayanan Publik diharapkan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi serta pengembang aplikasi layanan publik untuk menyematkan *link iframe* kuesioner per jenis layanan publik pada masing-masing *subsite* layanan publik.

2

Via SAPA APIP
Untuk Unit Non Pelayanan Publik dan Unit Pelayanan Publik yang belum menggunakan aplikasi layanan publik, Unit dapat mendistribusikan *link iframe* dan selanjutnya penerima layanan dapat langsung mengisi kuesioner pada link tersebut.

BADAN POM

Fasilitasi *Self Assesment* LKE PMPZI dan Survei IPP IPAK Unit Kerja

Pelaksanaan survei IPP-IPAK

1 Persiapan Survei

Sosialisasi dan sharing link survei oleh Inspektorat II kepada Unit Kerja

2 Februari 2021

2 Pelaksanaan Survei

Melalui subsite layanan publik dan aplikasi SAPA-APIP

2 Februari sd 12 Maret 2021

3 Pengolahan Survei

secara Otomatis melalui SAPA-APIP

Pendampingan Unit Kerja oleh TPI

Bimbingan Teknis

Intervensi pengisian LKE

Sosialisasi

Konsultasi melalui berbagai media

Desk Evaluasi TPI

Pendampingan evaluasi KemenPANRB

Strategi dan Kiat untuk Unit Kerja

1. Menguatkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai

2. Semua pegawai mendalami pelayanan sesuai tugas fungsinya

3. Ikuti timeline PDCA

4. Peningkatan kualitas SOP dan waktu pelayanan

5. Pelayanan prima kepada stakeholder

6. Melakukan inovasi local spesific yang berbeda dengan unit lain

7. Manajemen Media

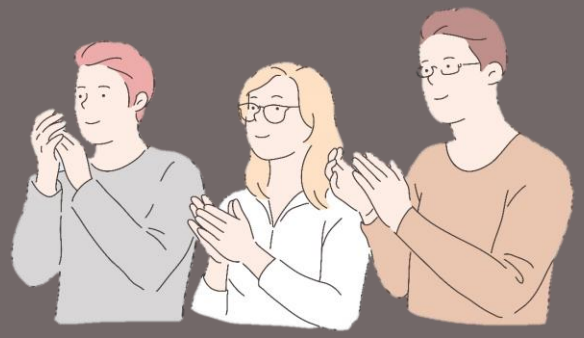

8. Menetapkan strategi komunikasi agar inovasi diketahui masyarakat

9. Menindaklanjuti masukan/ keluhan pengguna layanan

10. Persiapkan semua dokumen dalam bentuk digital

KOMITMEN PIMPINAN

- Membuat kebijakan
- Memberikan dukungan anggaran
- Melembagakan dan membudayakan inovasi
- Memberikan apresiasi

MOTIVASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

- Memiliki dorongan kuat untuk menciptakan inovasi

SUMBER DAYA MANUSIA YANG ANDAL

- Memiliki gagasan/ide baru membuat terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

Seluruh proses didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, Monev dan TL perbaikan

Seluruh hasil pelaksanaan Pembangunan ZI harus dibuktikan oleh stakeholder melalui survei eksternal

TERDOKUMENTASI & DIBUKTIKAN OLEH STAKEHOLDER

PENGAWALAN INSPEKTORAT UTAMA PADA PEMBANGUNAN ZI

2020

1 (satu) Unit Kerja berhasil mendapatkan predikat WBBM pada tahun 2020

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

10 (sepuluh) Unit Kerja mendapat predikat WBK pada tahun 2020

1. Direktorat Registrasi Obat
2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Direktorat Pengawasan Kosmetik
4. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
5. Direktorat Pengawasan pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
6. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
7. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
8. Balai Besar POM di Jakarata
9. Balai Besar POM di Semarang
10. Balai POM di Gorontalo

2019

7 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada tahun 2019

1. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Prekursor Psikotropika
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Balai Besar POM di Pekanbaru
4. Balai Besar POM di Padang
5. Balai Besar POM di Pontianak
6. Balai Besar POM di Yogyakarta
7. Balai Besar POM di Denpasar

2017

4 Unit Kerja Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK

1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONP
3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
4. Balai Besar POM di Surabaya

2011

2014

Badan POM memulai Pembangunan ZI

Pencanangan Zona Integritas

Berdasarkan monev yang dilakukan TPI , sampai dengan TW IV tahun 2020 seluruh unit kerja di Badan POM (61 Unit Kerja) telah melaksanakan Pencanangan Pembangunanan ZI Menuju WBK/WBBM oleh seluruh Unit Kerja, dari level pimpinan sampai staf

Penetapan Unit dikembangkan Zona Integritas

1. Surat Kepala Badan POM No.PI.03.03.1.72.6.29.1863 tanggal 14 Juni 2019 perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM kepada Menteri PANRB
2. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.05.20.173 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Badan POM Tahun 2020

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

1. Monitoring terhadap Unit Kerja yang ditetapkan WBK pada tahun 2017 sebagaimana Surat Kepala Badan POM No. PI.3.02.1.72.06.19.1892 Tgl 14 Juni 2019 perihal Laporan Monev Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM
2. Evaluasi terhadap 20 Unit Kerja yang diusulkan ke KemenPANRB
3. Laporan Monev ZI Triwulan I,II,III, IV Tahun 2019 dan Laporan Monev ZI TW I Tahun 2020

BEST PRACTICE PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM 1)

Peran aktif Agent Of Change dalam internalisasi ZI, budaya kerja

Optimalisasi penggunaan media sosial dalam internalisasi dan sosialisasi ZI pada Unit Kerja

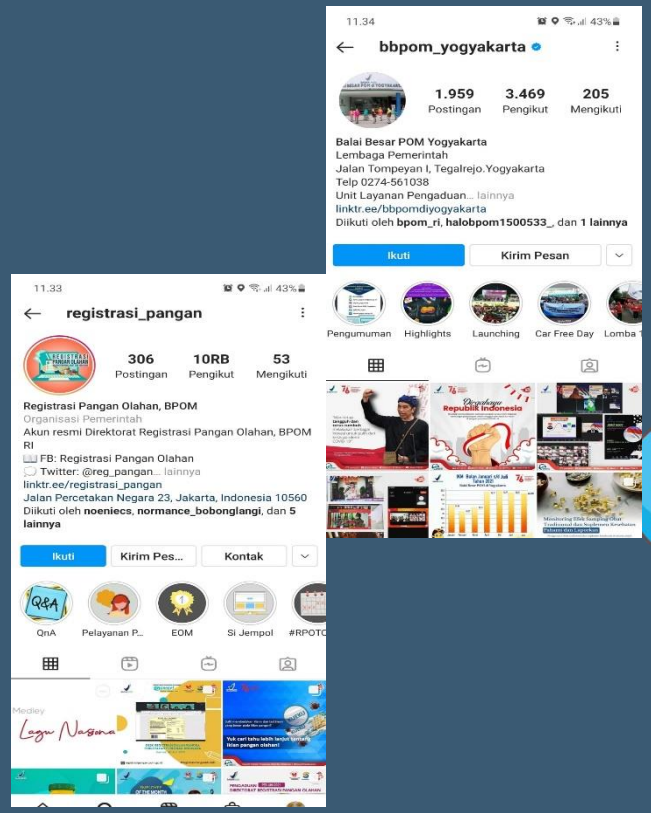

BEST PRACTICE PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM 2)

Elektronisasi pemberian pelayanan publik secara online dan terintegrasi, antara lain

1. Layanan registrasi produk OM secara online dan terintegrasi dengan KSWP
   - Aplikasi new-aero.pom.go.id (Ditreg Obat)
   - Aplikasi asrot.pom.go.id (Ditreg OTSKKos)
   - Aplikasi e-reg.pom.go.id (RPO)
2. Layanan SKI dan SKE dengan digital signature pada Ditwasdar PO, Ditwas OTSK
3. Layanan SAS Kosmetik pada Ditwaskos
4. Layanan Program Manajemen Risiko untuk produk pangan olahan pmr.pom.go.id (Ditwasprod PO)
5. Layanan Desk Online pada Ditwasdar PO

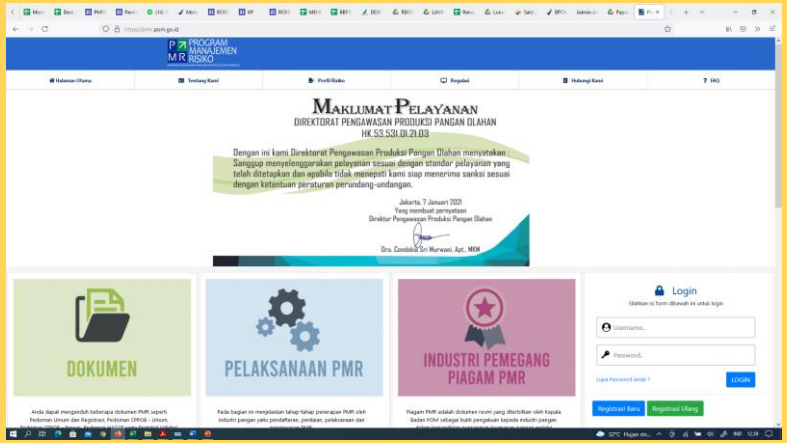

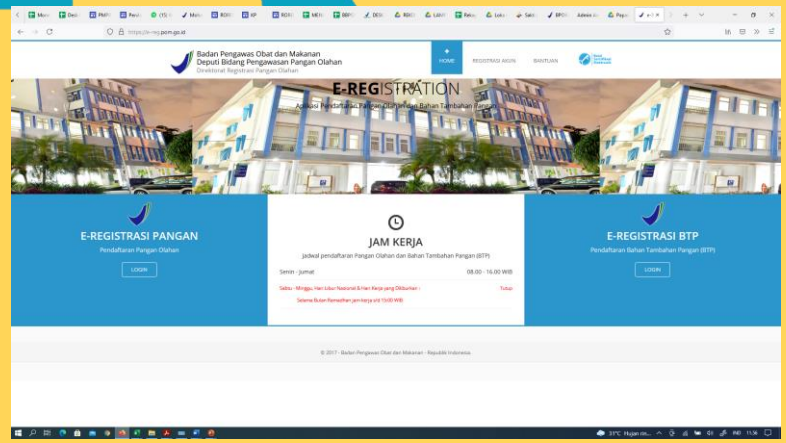

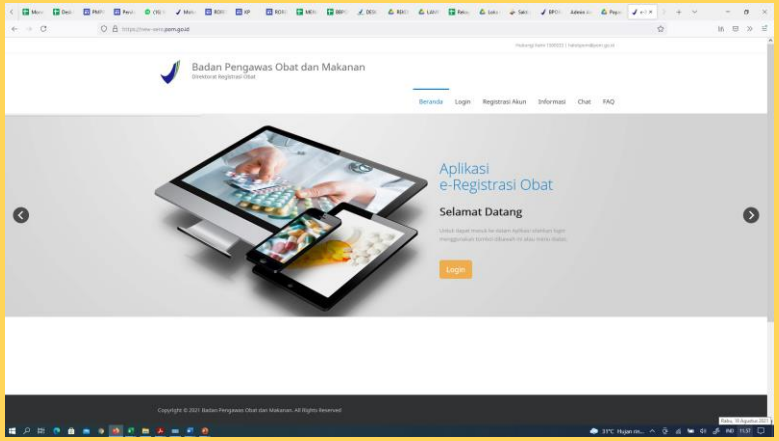

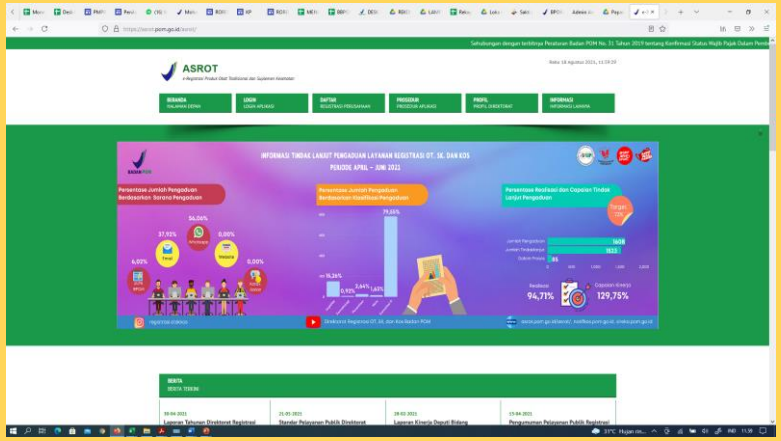

BEST PRACTICE PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM 3)

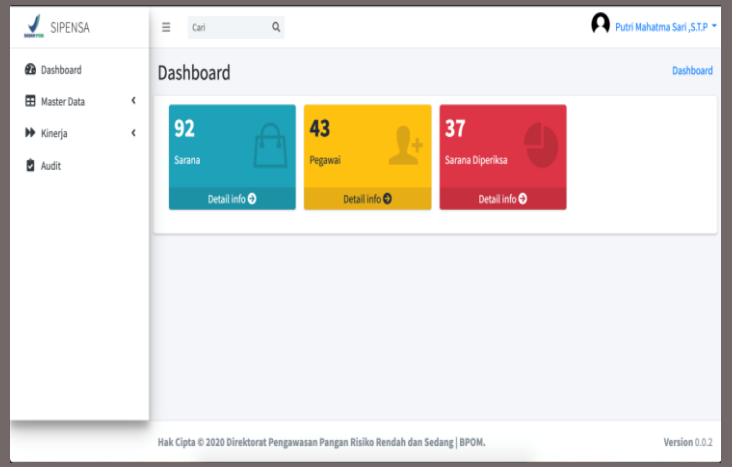

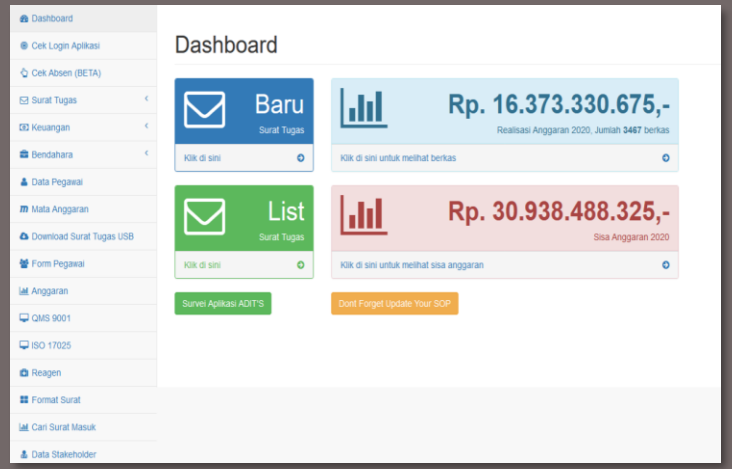

Pengukuran kinerja unit berbasis aplikasi antara lain pada:

1. Aplikasi ADITS (BBPOM di Semarang)
2. Aplikasi SIPENSA (Ditwasdar PO)

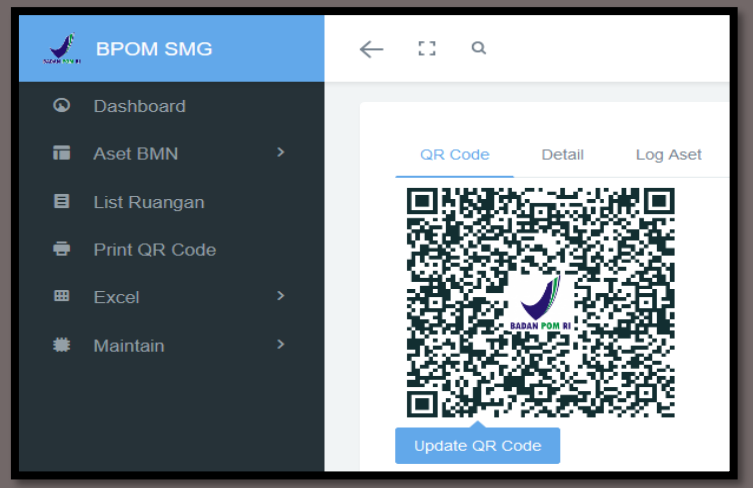

Elektronisasi pengelolaan BMN melalui aplikasi SIPANDA (BBPOM di Semarang)

BEST PRACTICE PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

4)

4)

Penghargaan Employee of the Month (Dit RPO)

Pemakaian Rompi Keramat bagi pegawai yang menerima punishment (BPOM di Gorontalo)

Grup WA untuk pengembangan kompetensi melalui mentoring (Dit RPO)

BEST PRACTICE PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM 5)

Percepatan timeline layanan melalui simplikasi, antara lain pada:

1. Layanan Pengakajian Keamana Mutu Gizi Produk Pangan dari 180 HK menjadi 85 HK (Dit SPO)
2. Layanan SKI dari 1 HK menjadi 6 Jam (Ditwasdar PO)
3. Layanan SKE dari 2 HK menjadi 6 Jam (Ditwas OTSK)
4. Layanan registrasi produk gula kristal putih dari 5 HK menjadi 1 HK (Dit RPO)
5. Layanan registrasi Obat (Ditreg Obat)
    - Obat baru dan produk biologi dari 120 HK, 100 HK menjadi 20 HK
    - Obat Generik dari 150 HK menjadi 5 HK
    - Obat COVID dari 20 HK menjadi 5 HK

Pelayanan yang mendekati masyarakat, antara lain pada:

1. Layanan Laboratorium Melindungi Sekolah dan Masyarakat “Layla Mesem” (BBPOM di Semarang)
2. Mobil Laoratorium Jajanan Anak Sekolah “Monas” (BBPOM di Jakarta)
3. Siap Layanan Uji Gratis “SILAURA” (BPOM di Gorontalo)

BEST PRACTICE PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM 6)

Dukungan penanganan dalam masa pandemi, antara lain pada:

Pelaksanaan pengujian spesimen COVID pada Lab Bio Hazard (PPPOMN dan BPOM di Gorontalo)

Penerbitan Pedoman Persetujuan Penggunaan Darurat melalui PerBPOM No 27 tahun 2020 (Ditreg Obat)

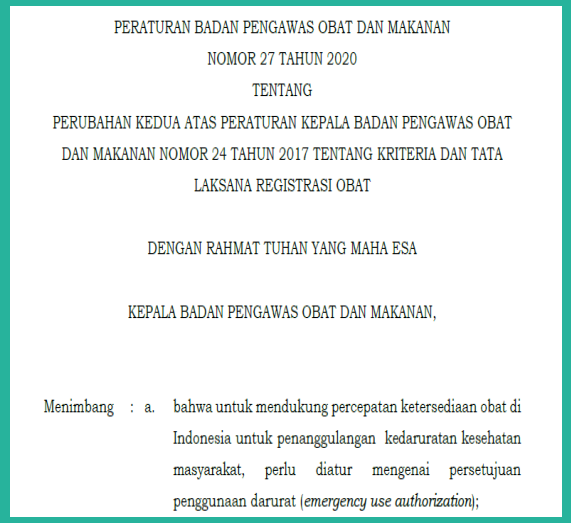

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan ketersediaan obat di Indonesia untuk penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat, perlu diatur mengenai persetujuan penggunaan darurat (*emergency use authorization*);

Pemanfaatan Minuman keras “Cap Tikus” menjadi Hand Sanitizer (BPOM di Gorontalo)

KESIMPULAN

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan bentuk komitmen Unit Kerja melaksanakan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

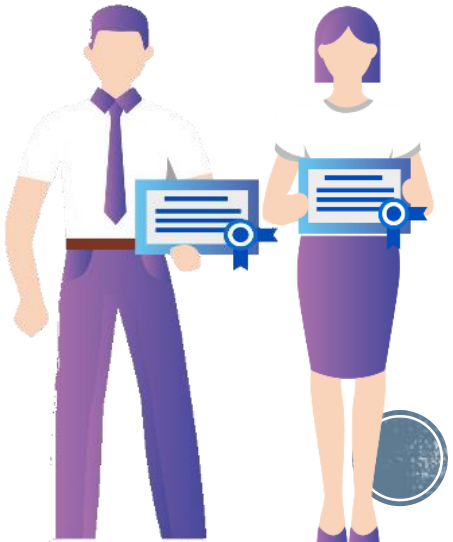

TERIMA KASIH

TWITTER

@insp2bpom

YOUTUBE

Inspektorat II BPOM

INSTAGRAM

@inspektorat2bpom